LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN SEPTEMBER DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Senin, 10 Oktober 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 78,39 %

b. Keuangan = 15.111.927.073 (73,50%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		7.320.000			5.786.372		
1	Operasional	7.320.000	83,33	79,04	5.786.372	(4,29)	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.175.000			2.675.000		
1	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6.175.000	50	47,26	2.675.000	(2,74)	digeser di anggaran perubahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000			4.350.000		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	100	87	4.350.000	(13)	Menyesuaikan kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	174.522.000			63.126.200		
1	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	174.522.000	66,66	38,82	63.126.200	(27,84)	Anggaran tidak terserap di kode rekening medikolegal dan honor tenaga ahli
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	29.638.000			0		
1	PelaksanaanKegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Perempuan Korban Bencana Tingkat Desa	29.615.000	100	0	0	(100)	menyesuaikan kebutuhan pada anggaran perubahan
2	Monev Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Perempuan Korban Bencana Tingkat Desa	23.000	100	0	0	(100)	menyesuaikan kebutuhan pada anggaran perubahan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA							
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	29.390.000			11.957.000		
1	Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kabupaten/Kota	28.940.000	100	81,32	11.957.000	(18,68)	Masih ada tindak lanjut dari tahap pertama pelaksanaan pilot project di Kota Semarang, untuk tahap selanjutnya masih menunggu assessment lanjutan dari tim
2	Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kab/Kota	450.000	100	0	0	(100)	Evaluasi masih menunggu tindak lanjut dari hasil assessment terhadap pilot project pada salah satu kelurahan di Kota Semarang
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.399.132.000			699.566.000		

1	Belanja Uang Bantuan Kebutuhan Spesifik Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu (Hibah Queensland)	1.399.132.000	100	50	699.566.000	(50)	Tahap 2 belum bisa dilaksanakan menunggu koordinasi dengan kantor pos. Di tahap 1 masih ada 56 penerima manfaat yang gagal salur karena beberapa hal salah satunya alamat penerima manfaat tidak ditemukan
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	39.880.000			27.779.712		
1	Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO	36.375.000	100	73,62	26.779.712	(26,38)	perubahan anggaran pelaksanaan
2	Pemantauan dan Evaluasi Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO	3.505.000	100	28,53	1.000.000	(71,47)	perubahan anggaran pelaksanaan dan monev rakor
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	174.522.000			86.937.000		
1	Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	174.522.000	75	68,21	86.937.000	(6,79)	layanan menyesuaikan kebutuhan korban
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							

	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	44.586.000			0		
1	Persiapan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA	4.716.000	100	0	0	(100)	masih dalam proses penyusunan modul pelatihan manajemen kasus KTPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA
2	Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA	38.870.000	100	0	0	(100)	masih dalam proses penyusunan modul pelatihan manajemen kasus KTPA/TPPO bagi SDM UTD PPA
3	Evaluasi dan Monitoring Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA	1.000.000	100	0	0	(100)	masih dalam proses penyusunan modul pelatihan manajemen kasus KTPA/TPPO bagi SDM UPTD PPA
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera							
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	31.309.000			2.229.187		
1	Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA	31.309.000	100	66,60	2.229.187	(33,40)	perubahan kode rekening dari perlengkapan peserta menjadi paket

							alat dan bahan pelatihan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	23.760.000			4.094.731		
1	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7.466.000	100	59,28	4.094.731	(40,72)	SSK menyesuaikan jadwal mitra kerja BKOW
2	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16.294.000	100	0	0	(100)	SSK menyesuaikan jadwal mitra kerja BKOW
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	18	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan September terdapat 11 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yait Operasional;
2. KegiatanÂ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPDÂ terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan;

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
4. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/KotaÂ terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kabupaten/Kota, dan Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Advokasi Implementasi Perda di Kab/Kota;
5. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan ProvinsiÂ terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Belanja Uang Bantuan Kebutuhan Spesifik Anak Yatim/Piatu/Yatim Piatu (Hibah Queensland);
6. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO dan Pemantauan dan Evaluasi Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO;
7. Kegiatan Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi;
8. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan ProvinsiÂ terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi;
9. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi terdapat 3 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA, Pelaksanaan Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA dan Evaluasi dan Monitoring Pelatihan Manajemen Kasus KTPA/ TPPO bagi SDM UPTD PPA;
10. Kegiatan Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kualitas Produk dan Jaringan Usaha Kelompok UPPKA;
11. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaÂ terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW dan Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW;
12. Dana DAK Perlindungan Perempuan menyesuaikan kebutuhan korban sehingga menyesuaikan pada anggaraan perubahan di kode rekening medikolegal dan honor tenaga ahli (seksi PP);
13. Belum semua Kabupaten/Kota menyusun GDPK. Baru Provinsi dan 14 kab/kota yang menyusun GDPK (Seksi Dalduk KS);
14. Indikator keaktifan tribina dan UPPKA sudah tidak tercantum pada laporan DALLAP NEW SIGA (Seksi Dalduk KS);
15. Belum semua kab/kota menginput data pada aplikasi siga jateng secara optimalÂ (Seksi Data);
16. Kegiatan DAK NF peningkatan kapasitas SDM PPT PPA Prov dan kab/kota belum dapat dilaksanakan menunggu anggaran perubahan (seksi PA);
17. Masih adanya Puspaga di Kabupaten/Kota yang belum aktif menyediakan layanan keluarga secara komprehensif (seksi PHA dan KHP);
18. ARG di OPD Provinsi Jateng masih belum optimal, baru sebesar 37,48% dari total seluruh APBD Prov Jateng, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan Kemendagri sebesar 75% (seksi KHP);
19. Belum ada kesesuaian jadwal dari Mitra Kerja BKOW (Seksi Parmas);
20. Data terkait indikatorÂ KB dan Dalduk KS pada aplikasi New Siga masih kurang akurat (seksi KB);
21. Petugas PPKBD masih kurang cermat dalam pencatatan jenis KB yang diikuti akseptor (seksi KB).

Upaya

1. Melakukan pergeseran kode rekening medikolegal dan honor tenaga ahli ke rekening layanan rujukan untuk menyesuaikan kebutuhan (Seksi PP);
2. Advokasi ke Kab/Kota yang belum menyusun GDPK (Seksi Dalduk KS);
3. Indikator yang dipakai terkait keaktifan tribina dan UPPKA dalam NEW SIGA hanya memakai indikator yang terdaftar pada awal tahun (Dalduk KS);
4. Penambahan anggaran untuk honor petugas yang menangani data dan informasi terutama di Kabupaten/Kota apabila memungkinkan (Seksi Data);
5. Kegiatan DAK NF peningkatan kapasitas SDM PPT PPA prov dan kab/kota akan dilaksanakan pada anggaran perubahan (Seksi PA);
6. Mendorong puspaga di Kabupaten/Kota yang telah terbentuk untuk aktif menyediakan layanan (seksi PHA dan KHP);
7. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur terkait PPRG di OPD tahun 2022 untuk mendorong Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi (seksi KHP);
8. Kegiatan dan penyesuaian jadwal BKOW akan menyesuaikan pada anggaran perubahan (Seksi Parmas);
9. Koordinasi dengan BKKBN untuk memperoleh data yang akuratÂ (seksi KB);
10. Mendukung advokasi PPKBD melalui pertemuan rutin PPKBD tingkat kab/kota (seksi KB).

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Kegiatan Trauma Healing pada perempuan dan anak pada kondisi darurat (Seksi PP);
2. sosialisasi pencegahan kekerasan dan TPPO (Seksi PP);
3. Monitoring dan evaluasi GDPK dan SSK di Kabupaten/Kota (Seksi Data);
4. Rakor data dengan OPD Provinsi (Seksi Data);
5. Rakor pencegahan KTA dan TPPO (seksi PA);
6. Penyaluran bantuan Queensland tahap 2 (seksi PHA);
7. Evaluasi kegiatan forum anak (seksi PHA);
8. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam proses pengambilan keputusan di 6 titik (seksi KHP);
9. Pelatihan PPRG Desa di Kab. Kebumen (rencana DRPPA) (seksi KHP);
10. Tindak Lanjut pilot project ketahanan keluarga di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang (seksi KHP);
11. Penyusunan draft pergub PUG (seksi KHP);
12. Monitoring TMKK (Seksi KIE);
13. Rakor Penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (Seksi Parmas);
14. Monev pelayanan KB kab/kota dalam rangka penggerakan KB (seksi KB).

***Stressing* Pengendalian :**

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. SPSE pengadaan langsung maupun tidak langsung dan PD3N Siera harus diinput setiap bulan;
8. Pengadaan barang/jasa dibawah 200 juta harus diupayakan melalui E-Blangkon (mamin dan ATK).

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan September 2022, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	77,06	78,39	73,50	1,33
2	Sekretariat	74,28	77,19	74,35	2,92
3	Bidang KHPP	77,42	88,67	77,34	11,25
4	Bidang PHPA	90,84	59,59	58,06	(31,25)
5	Bidang KB KIE	78,63	87,42	82,13	8,80
6	Bidang DALDUK KS	74,51	90,14	72,20	15,63
7	Bidang Data Parmas	75,95	78,11	75,00	2,16

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan September 2022, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Senin 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI DINAS JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001